

DETERMINAN PERILAKU TIDAK ETIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang)

Sri Indayani^a, Nurlina^b, Iqlima Azhar^{c*}

^{abc} Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra - Langsa

^{*c} Email: iqlima_a@unsam.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari pengendalian internal, penegakan peraturan, keadilan distributif terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 80 responden.. Hasil penelitian ini menyatakan struktur pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis, perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan, penegakan peraturan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis, penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis, keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis.

Kata kunci : pengendalian internal, penegakan peraturan, keadilan distributif, perilaku tidak etis, kecurangan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of internal control, enforcement of regulations, distributive justice on fraud through unethical behavior. The data analysis method used is the classical assumption test, path analysis test and Sobel test using SPSS as an analytical tool. The results of this study indicate that the internal control structure has a significant effect on fraud, enforcement of regulations has no effect on unethical behavior, distributive justice has a significant effect on unethical behavior, and unethical behavior has no effect on fraud. Internal control has no effect on fraud, enforcement of regulations has a significant effect on fraud, distributive justice has no effect on fraud. Internal control has no effect on fraud through unethical behavior, enforcement of regulations affects deficiencies through unethical behavior, distributive justice has no effect on fraud through unethical behavior.

Keywords: internal control, enforcement of regulations, distributive justice, unethical behavior, fraud.

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh atau mendapatkan uang, aset, dan lain sebagainya yang tentunya dapat merugikan orang lain (Aini dkk, 2017). Kecurangan dapat terjadi karena adanya perilaku tidak etis karyawan yang menimbulkan kecurangan tersebut terjadi. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan (Silvia, 2018).

Dari hasil survey *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2016 jenis tindak kecurangan yang paling banyak terjadi adalah korupsi sebesar 67%, namun berbeda halnya saat survey dilakukan kembali pada tahun 2019 hasil menunjukkan persentase korupsi sebesar 64,4%.

Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) mencatat kerugian negara atas kasus korupsi di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2018 mencapai Rp398,7 miliar. Pada website Waspada.id memberitakan bahwa adanya kasus proyek gagal bayar sebesar 13,383,250,951 APBK 2019 yang dibayar menggunakan APBK Aceh Tamiang TA 2020 (murni).

Untuk mencegah kecurangan tersebut di perlukannya pengendalian internal yang efektif, berdasarkan dari PP No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Pendistribusian pegawai merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan. Keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh pegawai berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi individu (Yulianti, 2016). Distributif yang diberikan suatu organisasi harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada instansi karena bagi karyawan pendistribusian yang adil merupakan faktor yang menentukan kesejahteraan.

Dalam suatu instansi juga apabila penegakan peraturan kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang salah satunya dengan melakukan kecurangan.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa pengendalian internal, penegakan peraturan, dan keadilan distributif merupakan hal yang penting jika ketiga hal tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik dan efisien maka akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang melanggar, seperti terjadinya perilaku tidak etis karyawan hingga melakukan kecurangan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kecurangan (Fraud)

Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam survai *fraud* Indonesia tahun 2016 mengemukakan bahwa, *Fraud* adalah masalah yang semakin berkembang dewasa ini. Para pelaku-pelaku yang melakukan *Fraud* saat inipun tidak hanya pada golongan atas saja, namun sudah merambah dan menyentuh lapisan pegawai bawah, hal ini tentunya menjadi hal yang patut kita waspadai dan perdulikan terhadap sekeliling tempat dimana kita bekerja, *Fraud* ini sendiri merupakan bahaya laten yang mengancam dunia.

Perilaku Tidak Etis

(Yuliani, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan

bahaya bagi orang lain dan lingkungan, iya juga menyebutkan terdapat beberapa Indikator-indikator perilaku tidak etis diantaranya:

1. Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi (*abuse position*)
2. Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*)
3. Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resource*)
4. Perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Pengendalian Internal

Dalam penelitian (Adinda, 2015) ia menyatakan bahwa, pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh kepala suatu instansi, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Ia juga menyebutkan bahwa tindakan/aktivitas pengendalian yang ada dalam organisasi dikelompokkan dalam beberapa poin diantaranya :

- a. Pengendalian Pencegahan (*preventive controls*) bertujuan untuk mencegah galat (*errors*) atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.
- b. Pengendalian Pendeteksian (*detective controls*) bertujuan untuk menginformasikan kepada manajemen galat atau masalah yang sedang terjadi atau beberapa saat setelah terjadi.
- c. Pengendalian Pemulihan (*corrective controls*) biasanya digunakan bersama dengan pendeteksian, bertujuan untuk memperbaiki kembali dari akibat terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

Penegakan Peraturan

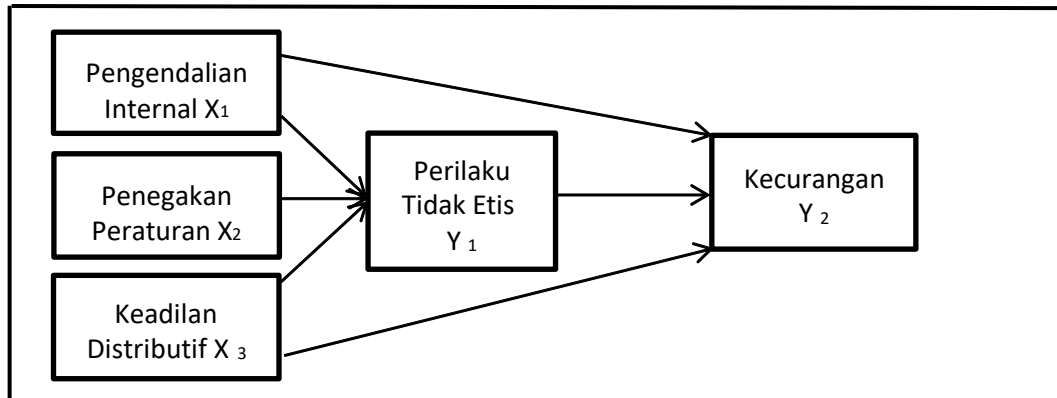
Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh (Pratiwi, 2016) ia menyebutkan bahwa, penegakan peraturan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan Distributif

Keadilan distributif didefinisikan sebagai persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian sumberdaya organisasi yang mengevaluasi distribusi hasil-hasil organisasi, dengan memperhatikan beberapa aturan distributif, yang paling sering digunakan adalah hak menurut keadilan dan kewajaran (Yulianti, 2016). Keadilan distributif terjadi pada saat seseorang menerima apa yang harusnya mereka terima, seseorang merasakan ketidakadilan tersebut pada saat mereka menerima upah yang dibayarkan kepada mereka lebih rendah dari pihak lain tetapi berada di pekerjaan dan organisasi sama. Jika keadilan distributif berjalan dengan baik maka karyawan akan merasa puas dan akan berkomitmen dengan organisasi. Menurut teori John Rawls tentang keadilan sebagai keadilan, teori ini terdiri dari komponen inti yaitu : (1) Persamaan hak dan kebebasan; (2) Persamaan kesempatan

untuk semua, dan (3) Pengaturan ketidaksetaraan ekonomi yang berfokus pada maksimalisasi manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Pengendalian internal (PI) berpengaruh terhadap perilaku tidak etis
- H2 : Penegakan Peraturan berpengaruh terhadap Perilaku tidak etis.
- H3 : Keadilan Distributif (KD) berpengaruh terhadap Perilaku tidak etis.
- H4 : Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan
- H5 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan
- H6 : Penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan
- H7 : Keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan
- H8 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis.
- H9 : Penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan melalui Perilaku tidak etis
- H10 : Keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang dan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 6 bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja selama 2 tahun lebih berjumlah 400 orang. Penarikan sampel menggunakan rumus Slovin, diperoleh sampel sebanyak 80 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survey dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan-pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan tujuan memperoleh informasi

terkait variable penelitian (Sugiyono, 2015:62). Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pengukuran *Likert*.

Berdasarkan metode pengumpulan data berupa kuesioner, instrument akan disebarikan pada 80 responden dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu, Pegawai Negri Sipil dan telah menjalani masa kerja selama 2 tahun. Setiap pertanyaan disusun sedemikian rupa dan dijawab dalam tingkatan jawaban yang ditentukan. Urutan skala dalam penelitian ini menggunakan 9 angka penilaian, yaitu dari 1 sampai dengan 9.

Analisis dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah suatu model telah terdistribusi dengan normal atau tidak (Munparidi, 2012). Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan dasar pengambilan keputusan yaitu: a. Jika nilai signifikansi $>$ dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, b. Jika nilai signifikansi $<$ dari 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan pengujian terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,880. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual model analisis jalur sudah berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

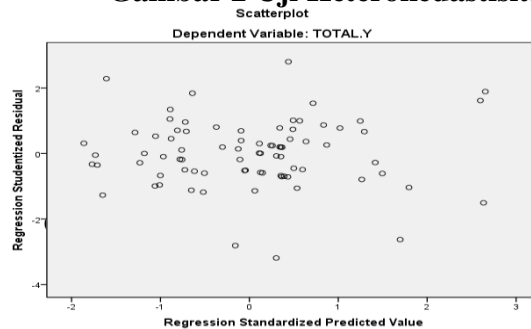
Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar masing-masing variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak boleh ada terjadi korelasi diantara variabel independen apabila tidak terjadi korelasi maka model regresi dikatakan baik. Multikolinieritas tidak terjadi apabila jumlah nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak lebih dari 10 ($VIF < 10$) dengan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($tolerance > 0,10$) (Ghozali, 2009: 28). Berdasarkan uji ini dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($tolerance > 0,10$) dan nilai VIF tidak lebih dari 10 ($VIF < 10$). Dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2009:36) uji heterokedastisitas dapat digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi dapat menggunakan gambar/chart model *scatterplot* dengan program SPSS. Dasar untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu:

- a. Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu secara teratur (bergelombang, menyebar dan menyempit) maka itu mengindikasikan bahwa telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta tidak ada titik-titik yang menyebar dibagian atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka itu artinya tidak terjadi heterokedastisitas

Gambar 2 Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data olah SPSS 2021

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada variabel pengendalian internal, penegakan peraturan, keadilan distributif, perilaku tidak etis, dan kecurangan, berdasarkan hasil uji validitas pada variabel pengendalian internal dengan 5 item pernyataan, penegakan peraturan dengan 5 item pernyataan, keadilan distributif dengan 3 item pernyataan, perilaku tidak etis dengan 4 item pernyataan, dan kecurangan dengan 5 item pernyataan. Pernyataan dinyatakan semua valid dikarenakan nilai korelasi *pearson* lebih besar dari 0.30, hingga dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan nilai *cronbach alpha* dengan menggunakan SPSS pada item pernyataan, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel berada diatas nilai *cronbach alpha* yang ditetapkan dalam penelitian sebesar 0.60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini memiliki 2 persamaan yaitu :

$$PTE = 36,178 + -0,250PI + -0,111 + -0,250 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$K = 27,987 + 0,022PI + -0,333PP + -0,118KD + 0,042 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

- PI : Pengendalian Internal
- PP : Penegakan Peraturan
- KD : Keadilan Distributif
- PTE : Perilaku Tidak Etis
- K : Kecurangan

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Perilaku Tidak Etis

Tabel 1 “ Ringkasan Hipotesis 1

Variabel	R	R ²	thitung	Sig	Koefisien	Konstanta
PI → PTE	0,486	0,236	-2,147	0,035	-0,250	36,178

Berdasarkan perhitungan tabel 1 dapat ditentukan :

Persamaan garis regresi; Berdasarkan tabel 1 menggambarkan bahwa nilai koefisien PI sebesar -0,250 berarti apabila pengendalian internal naik 1 satuan, maka perilaku tidak etis akan mengalami penurunan sebesar 0,250 dengan asumsi variabel pengendalian internal tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2); berdasarkan hasil pada tabel 1 dapat diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,486 dan determinasi (R^2) sebesar 0,236. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengendalian internal mempunyai hubungan terhadap perilaku tidak etis. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,486, hal ini berarti bahwa variabel pengendalian internal mempunyai hubungan yang sedang terhadap perilaku tidak etis.

Signifikan; berdasarkan hasil tabel 1 dapat diketahui nilai signifikan sebesar 0,035 menunjukkan bahwa $sig < 0,05$ sehingga pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis.

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Perilaku Tidak Etis

Tabel 2 : Ringkasan Hipotesis 2

Variabel	R	R^2	t hitung	Sig	Koefisien	Konstanta
PP → PTE	0,486	0,236	-0,919	0,361	-0,111	36,187

Berdasarkan perhitungan tabel 2 dapat di tentukan :

Persamaan garis regresi; nilai koefisien PP sebesar -0,111 berarti apabila penegakan peraturan naik 1 satuan, maka perilaku tidak etis akan mengalami penurunan sebesar 0,111 dengan asumsi variabel pengendalian internal tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2); nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,486 dan determinasi (R^2) sebesar 0,236. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penegakan peraturan mempunyai hubungan terhadap perilaku tidak etis. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,486, hal ini berarti bahwa variabel penegakan peraturan mempunyai hubungan yang sedang terhadap perilaku tidak etis.

Signifikan; nilai signifikan sebesar 0,361 menunjukkan bahwa $sig > 0,05$ sehingga pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis.

Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Perilaku Tidak Etis

Tabel 3: Ringkasan Hipotesis 3

Variabel	R	R^2	t hitung	Sig	Koefisien	Konstanta
KD → PTE	0,486	0,236	-0,250	0,032	-0,250	36,187

Berdasarkan perhitungan tabel 9 dapat ditentukan :

Persamaan garis regresi ; nilai koefisien sebesar -0,250 berarti apabila keadilan distributif naik 1 satuan, maka perilaku tidak etis akan mengalami penurunan sebesar 0,250 dengan asumsi variabel keadilan distributif bernilai tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2); Berdasarkan hasil pada tabel 9 dapat diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,486 dan determinasi (R^2) sebesar 0,236. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan distributif mempunyai hubungan terhadap perilaku tidak etis. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,486, hal ini berarti variabel keadilan distributif mempunyai hubungan yang sedang terhadap perilaku tidak etis.

Signifikan ; nilai signifikansi sebesar 0.032 menunjukkan bahwa $sig < 0,05$ sehingga keadilan distributif mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis.

Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Tabel 4 : Ringkasan Hipotesis 4

Variabel	R	R^2	t hitung	Sig	Koefisien	Konstanta
PTE \rightarrow K	0,408	0,166	0,344	0,732	0,042	27,987

Berdasarkan perhitungan tabel 4 dapat ditentukan :

Persamaan garis regresi; nilai koefisien sebesar 0,042 berarti apabila perilaku tidak etis naik 1 satuan, maka kecurangan akan mengalami penurunan sebesar 0,042 dengan asumsi variabel perilaku tidak etis bernilai tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2); nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,408 dan determinasi (R^2) sebesar 0,166. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku tidak etis mempunyai hubungan terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,408, hal ini berarti variabel perilaku tidak etis mempunyai hubungan yang sedang terhadap kecurangan.

Signifikan; nilai signifikansi sebesar 0,732 menunjukkan bahwa $sig > 0,05$ sehingga perilaku tidak etis tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Tabel 5: Ringkasan Hipotesis 5

Variabel	R	R^2	t hitung	Sig	Koefisien	Konstanta
PI \rightarrow K	0,408	0,166	0,175	0,862	0,022	27,987

Berdasarkan perhitungan tabel 5 dapat ditentukan :

Persamaan garis regresi; nilai koefisien sebesar 0,022 berarti apabila pengendalian internal 1 satuan, maka kecurangan akan mengalami penurunan sebesar 0,022 dengan asumsi variabel pengendalian internal bernilai tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2); nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,408 dan determinasi (R^2) sebesar 0,166. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal mempunyai hubungan terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,048, hal ini berarti variabel pengendalian internal mempunyai hubungan yang rendah terhadap kecenderungan kecurangan. Nilai R^2 sebesar 0,166 artinya 1,66% perubahan pada variabel pengendalian internal dapat dijelaskan oleh variabel kecurangan. Pengendalian internal mempengaruhi kecurangan sebesar 1,66%, sedangkan sisanya 98,34% dijelaskan oleh variabel lain.

Signifikan; nilai signifikansi sebesar 0,862 menunjukkan bahwa $sig > 0,05$ sehingga pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan.

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*)

Tabel 6 : Ringkasan Hipotesis 6

Variabel	R	R ²	t hitung	Sig	Koefisien	Konstanta
PP → K	0,408	0,166	-2,605	0,011	-0,333	27,987

Berdasarkan perhitungan tabel 6 dapat ditentukan :

Persamaan garis regresi; nilai koefisien sebesar -0,333 berarti apabila penegakan peraturan naik 1 satuan, maka kecurangan akan mengalami penurunan sebesar 0,333 dengan asumsi variabel penegakan peraturan bernilai tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²); nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,408 dan determinasi (R²) sebesar 0,116. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah penegakan peraturan mempunyai hubungan terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,408, hal ini berarti variabel penegakan peraturan mempunyai hubungan yang sedang terhadap kecurangan. Nilai R² sebesar 0,116 artinya 1,16% perubahan pada variabel kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel penegakan peraturan. Penegakan peraturan mempengaruhi kecendrungan kecurangan sebesar 1,16%, sedangkan sisanya 98,34% dijelaskan oleh variabel lain.

Signifikan; nilai signifikansi sebesar 0,011 menunjukkan bahwa sig<0,05 sehingga penegakan peraturan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan.

Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*)

Tabel 7 : Ringkasan Hipotesis 7

Variabel	R	R ²	t hitung	Sig	Koefisien	Konstanta
KD → K	0,408	0,166	-0,947	0,347	-0,118	27,987

Berdasarkan perhitungan tabel 7 dapat ditentukan :

Persamaan garis regresi; nilai koefisien sebesar -0,118 berarti apabila keadilan distributif naik 1 satuan, maka kecurangan akan mengalami penurunan sebesar -0,118 dengan asumsi variabel keadilan distributif bernilai tetap.

Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²) ; nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,408 dan determinasi (R²) sebesar 0,116. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan distributif mempunyai hubungan terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diketahui besarnya koefisien korelasi adalah 0,408, hal ini berarti variabel keadilan distributif mempunyai hubungan yang sedang terhadap kecurangan. Nilai R² sebesar 0,116 artinya 1,16% perubahan pada variabel kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel keadilan distributif. Keadilan Distributif mempengaruhi kecurangan sebesar 1,16%, sedangkan sisanya 98,34% dijelaskan oleh variabel lain.

Signifikan ; nilai signifikansi sebesar 0,347 menunjukkan bahwa sig>0,050 sehingga keadilan distributif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecendrungan kecurangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Perilaku Tidak Etis

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,035 atau dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,250. Artinya setiap kenaikan 1 satuan pengendalian internal maka akan diikuti dengan penurunan perilaku tidak etis begitu juga sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Prekanida, 2015) yang dimana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sudah memiliki pengendalian internal yang efektif, sehingga dapat mengurangi terjadinya perilaku tidak etis, hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan/mengajukan surat permohonan izin ke instansi, yang dimana disana terlihat jelas tertatanya pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan poksi masing-masing pegawai ataupun masing-masing bidang.

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Perilaku Tidak Etis

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,361 atau diatas 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,111 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan penegakan peraturan maka akan diikuti dengan turunnya perilaku tidak etis demikian sebaliknya.

Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa adanya alasan lain yang mendasari pegawai melakukan kecurangan yaitu adanya kesempatan, tegaknya peraturan disuatu instansi tidak akan mempengaruhi pegawai berperilaku tidak etis tetapi kesempatan lah yang membuat mereka merasa mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan.

Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Perilaku Tidak Etis

Hasil dari penelitian ini yaitu berpengaruh signifikan antara keadilan distributif dengan perilaku tidak etis, yang dimana hal ini dapat kita perhatikan nilai signifikansi sebesar 0,032 atau dibawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,250 yang dimana setiap naiknya 1 satuan dari keadilan distributif ini akan diikuti oleh penurunan perilaku tidak etis.

Penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh (yulianti,2016) yang dimana pada hasil penelitiannya ia menyebutkan bahwa, adanya pengaruh pada variabel keadilan distributif terhadap perilaku tidak etis. Semakin adil keadilan distributif maka perilaku tidak etis di suatu instansi tidak akan terjadi, dengan adanya keadilan distributif yang dirasakan dapat meningkatkan kepuasan dan komitmen individu pada suatu instansi sehingga perilaku tidak etis tidak terjadi pada suatu instansi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang baik, dalam artian sudah baik dalam hal pendistribusian,

pernyataan ini disimpulkan dari persepsi karyawan saat peneliti membagikan kuesioner, dan responden menggambarkan kondisi instansi disetiap pernyataan.

Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan

Dari hasil penelitian ini perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,732 yang lebih besar dari 0,05 dan adanya nilai koefisien regresi dengan besaran 0,042. Artinya setiap kenaikan pada perilaku tidak etis maka akan diikuti dengan kenaikan kecurangan.

Penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Yuliani, 2018) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, dimana perilaku tidak etis dapat diindikasikan bahwa seseorang yang memiliki perilaku tidak etis yang kuat akan cenderung melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan adanya sikap rasionalisasi pada diri pegawai yang merasa tindakan yang ia lakukan wajar yang didasari dengan alasan yang ia anggap rasional.

Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan

Penelitian ini memiliki hasil yang dimana variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan hal ini dapat kita lihat dari adanya nilai signifikan dengan besaran 0,862 dengan nilai koefisien sebesar 0,022 yang dimana setiap kali pengendalian internal naik 1 satuan maka akan diikuti dengan menurunnya kecurangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal yang ada sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi antar jenjang dalam instansi, khususnya informasi ditingkat pengambilan keputusan tentang penurunan kualitas risk exposure dan tindakan perbaikan sehingga memicu adanya kesempatan para pegawai untuk melakukan kecurangan.

Penegakan Peraturan Terhadap Kecurangan

Penelitian ini memiliki hasil yang dimana variabel penegakan peraturan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan hal ini dapat kita lihat dari adanya nilai signifikan dengan besaran 0,011 artinya lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,333 yang dimana setiap kali naik 1 satuan maka akan diikuti dengan menurunnya kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (yudistira dkk, 2017) yang mengatakan bahwa Variabel penegakan peraturan berpengaruh terhadap fraud. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peraturan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Sudah benar-benar tegak, sehingga karyawan tidak melakukan perilaku tidak etis dan tidak memicu terjadinya kecurangan.

Keadilan Distributif Terhadap Kecurangan

Dari hasil penelitian ini yaitu tidak berpengaruh antara variabel keadilan distributif terhadap kecurangan hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan dengan besaran 0,347 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien dengan besaran -0,118.

Hasil dari penelitian ini sama halnya dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Iailiyah, 2016) ia menyatakan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Berdasarkan dari survai lapangan yang telah dilakukan kecurangan tidak selalu terjadi karna pendistribusian yang kurang sesuai. Hal ini terjadi karena fenomena yang terjadi di Indonesia sendiri justru para pelaku koruptor itu sebagian besar mempunyai jabatan yang tinggi yang dimana memiliki gaji yang besar, namun tindakan fraud tersebut tetap saja terjadi hal ini disebabkan adanya faktor keserakahan yang ada serta adanya faktor *Fraud Triangle* yaitu tekanan berupa gaya hidup yang tinggi yang membuat seseorang tidak pernah puas sehingga mendorong diri untuk melakukan kecurangan tersebut, jadi adil atau tidak adil distributif yang diterima pegawai, pegawai akan tetap dapat melakukan tindakan kecurangan.

Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Melalui Perilaku Tidak Etis

Dari hasil penelitian ini antara variabel pengendalian internal terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis tidak berpengaruh hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96 dan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -10,6394 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,96, yang demikian maka pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis, atau perilaku tidak etis tidak dapat memediasi hubungan antara pengendalian internal dengan kecurangan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak memicu akan terjadinya kecurangan hal ini disebabkan karena adanya sikap rasionalisasi pegawai yang merasa tindakan yang ia lakukan adalah hal yang wajar sehingga menimbulkan terjadinya tindak kecurangan.

Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Melalui Perilaku Tidak Etis

Dari hasil penelitian ini yaitu adanya pengaruh antara variabel penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 1,96 dan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 10,2086 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,96, yang demikian maka pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis, atau perilaku tidak etis tidak dapat memediasi hubungan antara pengendalian internal dengan kecurangan.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Tiffany, 2016) yang memiliki hasil yang sama. Dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa Individu yang melakukan perbuatan melanggar peraturan harus dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan penegakan peraturan pada instansi ini bahwa perilaku tidak etis yang dilakukan karyawan dapat mendorong karyawan melakukan kecurangan.

Keadilan Distributif Terhadap Kecenderungan Kecurangan Melalui Perilaku Tidak Etis

Dari hasil penelitian ini antara variabel penegakan peraturan terhadap kecurangan tidak berpengaruh hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96 dan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 43,1030 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,96, yang demikian maka keadilan distributif tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis, atau perilaku tidak etis tidak dapat memediasi hubungan antara keadilan distributif dengan kecendrungan kecurangan.

Hasil dari penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (diyah, 2016) yang menyatakan bahwa adanya hasil yang berpengaruh negatif antara keadilan distributif terhadap kecendrungan kecurangan melalui perilaku tidak etis. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dan rasa rasionalisasi yang ada pada diri karyawan sehingga karyawan melakukan tindakan yang ia rasa itu rasional yang dimana hal tersebut terjadi karena adanya tekanan yang terjadi pada diri pegawai baik gaya hidup yang tinggi, banyak hutang dan lain sebgainya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan perilaku tidak etis dan dampaknya terhadap kecurangan (*fraud*) (studi pada sekretariat daerah di kabupaten aceh tamiang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sudah memiliki pengendalian internal yang efektif, sehingga dapat mengurangi terjadinya perilaku tidak etis, hal ini dibuktikan pada saat peneliti melakukan/mengajukan surat permohonan izin ke instnasi, tertatanya pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan poksi masing-masing pegawai ataupun masing-masing bidang.
2. Penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini menunjukkan bahwa adanya alasan lain yang mendasari pegawai melakukan kecurangan yaitu adanya kesempatan.
3. Keadilan distributif berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang baik, dalam artian sudah baik dalam hal pendistribusian, pernyataan ini disimpulkan dari persepsi karyawan saat peneliti membagikan kuesioner, dan responden menggambarkan kondisi instansi disetiap pernyataan.
4. Perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini disebabkan karena adanya sikap rasionalisasi pada diri pegawai yang merasa tindakan yang ia lakukan wajar yang didasari dengan alasan yang ia anggap rasional.

5. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal pada instansi ini sudah baik, sehingga tidak menimbulkan terjadinya tindak kecurangan.
6. Penegakan Peraturan berpengaruh terhadap kecurangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dikarenakan peraturan pada Sekretariat Daerah Sudah benar-benar tegak, sehingga tidak memicu terjadinya kecurangan.
7. Keadilan Distributif tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari diri pegawai baik berupaya gaya hidup yang tinggi atau hutang yang sehingga gaji yang telah adil diberikan tidak pernah cukup.
8. Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dikarenakan adanya sikap rasionalisasi yang membuat pegawai merasa tindakan yang ia lakukan adalah hal yang wajar.
9. Penegakan Peraturan berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dikarenakan sudah tegaknya peraturan di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana tidak memancing karyawan untuk berperilaku tidak etis hingga menimbulkan kecurangan.
10. Keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tekanan dan rasionalisasi dalam diri pegawai yang membuat ia merasa wajar melakukan hal itu.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk pemerintah yang memiliki banyak pegawai agar kiranya dapat terus meningkatkan sistem keamanan yaitu berupa pengendalian internal dan proses seleksi pegawai secara ketat sehingga perilaku tidak etis karyawan yang menyebabkan kecurangan tidak akan pernah terjadi pada instansi.
2. Untuk Pemerintah agar kiranya terus selalu menegakkan peraturan mengenai sistem informasi yang harus ditaati, dan menetapkan sanksi-sanksi yang sesuai untuk karyawan yang melanggar aturan, agar pelaporan selalu memiliki bukti transaksi yang jelas sehingga perilaku tidak etis tidak akan pernah ada pada diri karyawan, sehingga kecurangan tidak akan pernah terjadi pada instansi ini dan karyawan selalu berperilaku etis.
3. Bagi Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kecurangan seperti partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, dan faktor lainnya dalam melakukan penelitian mengenai kecenderungan kecurangan, memilih pernyataan-pernyataan yang akan di berikan kepada responden dengan pernyataan-pernyataan yang akan membuat setiap variabel mempunyai pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul, dkk. 2017. Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecendrungan Terjadinya Kecurangan (*Frad*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lombok Timur). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2016. *Survai Fraud Indonesia*. Jakarta : ACFE Indonesia Chapter 2016.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2019. *Survai Fraud Indonesia*. Jakarta : ACFE Indonesia Chapter 2019.
- Fitri Yulianti, Diyah. 2016. Pengaruh Moralitas Individu, Penegakan Hukum, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *E-Journal JOM Fekon*. Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.
- Masyarakat Transparan Aceh (24 jan 2019. 20.01). *Kerugian Negara Kasus Korupsi 2018 di Aceh Capai Rp398 M*. Dikutip 7 Desember 2020 dari : <https://www.gatra.com/detail/news/383788-MaTA:-Kerugian-Negara-Kasus-Korupsi2018-di-Aceh-Capai-Rp398-M>.
- Maya Adinda, Yanita. 2015. *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Disektor Pemerintahan Kabupaten Kelaten*. Universitas Negeri Semarang.
- Pratiwi, Tiffany. 2016. Pengaruh Penegakan Peraturan, Sistem Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Study Pada SKPD Kota Pekanbaru). *e- Journal JOM Fekon*. Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.
- Waspada.id (9 september 2020). *Kajari aceh tamiang akan proses kasus proyek gagal bayar rp. 13.383.250 APBK 2019*. Dikutip 18 Desember 2020 dari : <https://waspada.id/headlines/kajari-aceh-tamiang-akan-proses-kasus-proyek-gagalbayar-rp13-383-250-951-apbk-2019/>.
- Yuliani, Silvia. 2018. *Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kab. Pasaman Barat)*. Universitas Negeri Padang